



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGIANTO SABRAN**
2. Jabatan : **GUBERNUR**
3. NHK : **98627**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **21.450.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2350 m²/240 m² di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1130 m²/313 m² di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 1000000 m² di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 2000000 m² di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah Seluas 5000000 m² di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
6. Tanah Seluas 5000000 m² di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000
7. Tanah Seluas 3000000 m² di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **1.300.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **13.864.065.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **715.724.220**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 37.329.789.220

III. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. ----
Rp. 37.329.789.220

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.